

Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Aspek Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah

Astri Malati Sukma¹, Asep Iwa Hidayat², Aty Susanty³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
G23, H83, L86

Korespondensi:
Astri Malati Sukma
(astrimalati@gmail.com)

Received: 10-10-2023
Revised: 15-11-2023
Accepted: 21-11-2023
Published: 28-11-2023

Keywords:
Financial Reports,
Information Systems,
Regional Asset Management

Sitasi:

Sukma, A. M., Hidayat, A. I., & Susanty, A. (2023). Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Aspek Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 239-252.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.20>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This research aims to determine whether the regional financial management information system and regional fixed asset management have an effect on the quality of regional government financial reports in the West Bandung Regency Regional Government. The independent variable consists of regional financial management information systems and regional fixed asset management, while the dependent variable is the quality of regional government financial reports. This type of research is included in quantitative research, while the research methods used are descriptive and verification methods. The population in this study were employees of the accounting and asset recording section at SKPD in the West Bandung Regency Government. The sampling technique is non-probability sampling using purposive sampling, so the total sample is 94 people. The data analysis used in this research is multiple linear regression analysis using SPSS software. Partial and simulated research results show that leadership and work discipline influence employee performance. This study shows that there is a significant impact from the implementation of the Regional Financial Management Information System and Regional Fixed Asset Management on improving the quality of regional government financial reports.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Variabel independen terdiri dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah, sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai bagian akuntansi dan pencatatan aset di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Teknik penentuan sampel yaitu non probability sampling dengan menggunakan purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 94 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian secara parsial dan simulasi menunjukkan bahwa kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak signifikan dari implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan titik awal adanya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Siregar, 2015). Pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia (Sopannah et al., 2023). Salah satu pelaksanaan reformasi sektor publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Representasi kewajaran laporan keuangan dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Ratifah & Ridwan, 2012). Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdapat empat macam opini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Wajar dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, dan (4) Tidak Memberikan Pendapat.

Pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan BPK masih banyak pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di bawah ini akan disajikan data opini audit atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode 2015-2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Opini Audit atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2020

No	Tahun	Opini Audit
1	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2018 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WDP. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini WTP. Sementara pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali mendapatkan opini WDP. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah yang diunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum optimal terlihat dari opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain itu informasi yang dikutip dari artikel tahun 2019 menyebutkan bahwa menurut Sekretaris BPKD yaitu Lukman Hakim mengatakan terdapat dua indikator yang menjadi penilaian BPK untuk meraih WTP diantaranya soal pengelolaan keuangan dan soal aset. Dari hasil pemeriksaan BPK terdapat beberapa temuan berkaitan dengan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, soal kecurangan pembayaran (*mark up*) harga barang dalam sebuah proyek, dan persoalan aset. Beberapa hal tersebut menjadi beberapa faktor penyebab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sulit meraih WTP di tahun 2018 (Anggiono, 2019).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Elsye, 2016). Laporan pertanggungjawaban menjadi salahsatu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan (Rusdianti et al., 2022). Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas laproan keuangan pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Chabib & Rochmansjah, 2014). Pada kenyataannya berdasarkan informasi yang dikutip dari artikel menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diantaranya terkait dengan berbagai kasus korupsi keuangan daerah diantaranya penggelapan dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebesar Rp 7,7 miliar di RSUD Lembang tahun 2017 dan 2018, serta kasus korupsi Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah kabupaten Kabupaten Barat tahun 2020 yang dilakukan oleh mantan Bupati Bandung Barat (Ni'am & Santosa, 2022).

Selain sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pengelolaan aset tetap daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Salah stau aset yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud

yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa dari hasil rangkuman Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018-2019 terkait permasalahan penatausahaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat masih sangat kompleks khususnya terkait inventarisasi. Selain itu pencatatan seperti jumlah aset yang tidak akurat, data aset tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, data aset yang hilang fisiknya, sejumlah aset masih dikuasai oleh mantan PNS serta aset tanah yang belum tersertifikasi memberikan gambaran masih adanya proses inventarisasi yang belum akurat dalam mencatat data-data mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu berdasarkan informasi yang dikutip dari artikel menunjukkan belum optimalnya pengelolaan aset yang ditunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diantaranya terkait masih banyaknya aset yang belum memiliki sertifikat, banyaknya aset tetap yang belum tertib penyalurannya, pertanggungjawaban belanja, pencatatan, inventarisasi yang masih belum sesuai, serta aset yang masih dalam proses sengketa (Sari, 2019; Gimnastiar, 2021).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka evaluasi dan perbaikan, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan topik

kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. TELAAH TEORI

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sementara (Elsye, 2016) menyebutkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah sistem informasi yang sistematis dan terintegrasi yang membantu penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indikator sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diantaranya keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau output, dan relevansi sistem (Lestari & Hastuti, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Indikator pengelolaan aset tetap daerah diantaranya Inventarisasi aset daerah, legal audit aset daerah, penilaian aset daerah, optimalisasi aset daerah, serta pengawasan dan pengendalian aset daerah (Yusuf, 2015).

Laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Rambe & Rasdianto, 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa indikator karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah

daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Chabib & Rochmansjah, 2014). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salahsatu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020).

2.2 Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien (Malta & Rusdianti, 2023). Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf, 2015). Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta

terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mengacu pada prinsip good governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap daerah. Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari & Syofyan, 2016). Pengelolaan aset tetap daerah sangat penting dilakukan dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam menilai dan mengavaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui pengelolaan aset daerah secara tertib, maka informasi nilai aset daerah yang akan disajikan dalam akan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta akan menghasilkan laporan aset di neraca dengan informasi yang akurat. Semakin tinggi pengelolaan aset daerah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Poae et al., 2017).

2.3 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat dua indikator yang menjadi penilaian BPK untuk meraih WTP diantaranya soal pengelolaan keuangan dan soal aset (Anggiono, 2019). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salahsatu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020).

Selain sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pengelolaan aset tetap daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mengacu pada prinsip good governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap daerah. Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari & Syofyan, 2016). Pengelolaan aset tetap daerah sangat penting dilakukan dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam menilai dan mengavaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui pengelolaan aset daerah secara tertib, maka informasi nilai aset daerah yang akan disajikan dalam akan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta akan menghasilkan laporan aset di neraca dengan informasi yang akurat. Semakin tinggi pengelolaan aset daerah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Poae et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk dalam peneltiian ini yaitu sebagai berikut:

- H1: Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2: Pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3: Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai bagian akuntansi dan pencatatan aset di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Teknik penentuan sampel yaitu non probability sampling dengan menggunakan purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 94 orang. Variabel independen terdiri dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah, sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diantaranya keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau output, dan relevansi sistem (Lestari & Hastuti, 2020). Indikator pengelolaan aset tetap daerah diantaranya Inventarisasi aset daerah, legal audit aset daerah, penilaian aset daerah, optimalisasi aset daerah, serta pengawasan dan pengendalian aset daerah (Yusuf, 2015:179). indikator karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan

dapat dipahami. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner dengan tipe skala likert.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini diwakili oleh persamaan ($Y = \text{konstanta} + b_1X_1 + b_2X_2 + e$). Metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi koefisien, dan uji signifikansi koefisien dilakukan untuk menentukan apakah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, kriteria evaluasi model, seperti koefisien determinasi, uji signifikansi model (F-test), uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, digunakan untuk menilai keakuratan dan validitas model regresi. Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah dapat menjelaskan variasi dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diawali dengan hasil deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan, selain itu menunjukkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	58	61,70%
Wanita	36	38,29%
Usia		
20-30 Tahun	18	19,15%
31-40 Tahun	41	43,62%
41-50 Tahun	23	24,47%
Lebih dari 50 Tahun	12	12,76%
Pendidikan		
Diploma	7	7,45%
Strata 1	49	52,13%
Strata 2	27	28,72 %
Strata 3	11	11,70%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa pegawai di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mayoritas memiliki jenis kelamin pria sebesar 61,70% (58 orang), sedangkan jenis kelamin wanita sebesar 38,29% (36 orang). Dilihat dari segi usia pegawai di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mayoritas memiliki usia paling banyak sebesar 43,62%

(41 orang), sedangkan usia paling sedikit sebesar 12,76% (12 orang). Dilihat dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pegawai di SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mayoritas memiliki tingkat pendidikan paling banyak sebesar 52,13% (49 orang), sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit sebesar 7,45% (7 orang).

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Penelitian

No	Variabel	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor	Kategori
1	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	3686	4700	78,43	3,92	Baik
2	Pengelolaan Aset Tetap Daerah	3596	4700	76,51	3,83	Baik
3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3996	5170	77,29	3,86	Baik

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset tetap daerah, dan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel dan Reliabilitas

No	Variabel	r hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sistem Informasi	0,760	0,959	Valid dan reliabel
2	Pengelolaan Aset Tetap Daerah	0,677	0,977	Valid dan reliabel
3	Kualitas Laporan Keuangan	0,851	0,977	Valid dan reliabel

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (r hitung $> 0,203$). Artinya variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset tetap daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria validitas.

nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Artinya variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset tetap daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

Keterangan	Nilai Signifikansi	Kriteria	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,200	0,05	Normal

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi kolmogrov smirnov sebesar $0,200 > 0,05$, artinya model regresi

sudah memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal.

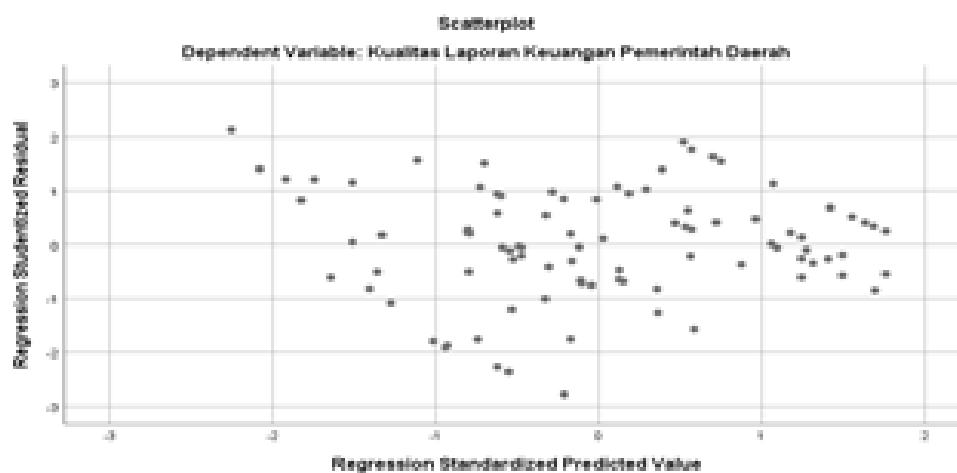
Tabel 6. Hasil Uji Multikolenieritas

Variabel	Nilai VIF	Kriteria	Keterangan
Sistem Informasi	1,727	10	Tidak Terjadi Multikolenieritas
Pengelolaan Aset Tetap Daerah	1,727	10	Tidak Terjadi Multikolenieritas

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Berdasarkan Tabel 6 di atas dari hasil pengujian multikolenieritas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel

sebesar $1,727 < 10$, artinya tidak terdapat gejala multikolenieritas pada model regresi.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan bahwa titik-titik berada di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y, selain itu titik-titik menyebar secara acak dan tidak

membentuk suatu pola tertentu, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 7. Analisis Regresi

Variabel	Koefesien	t	Sig.	Keterangan
Konstanta	0,002			
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,377	4,492>1,986	0,000<0,05	H ₁ Diterima
Pengelolaan Aset Tetap Daerah	0,514	6,625>1,986	0,002<0,05	H ₂ Diterima
F = 74,672>3,10				H ₃ Diterima
Sig= 0,000<0,05				
R ² = 62,1%				

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Berdasarkan Tabel 7 di atas maka dapat disajikan hasil persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = 0,002 + 0,377X_1 + 0,514X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa nilai koefesien regresi variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,377, sedangkan nilai koefesien regresi variabel pengelolaan aset tetap daerah sebesar 0,514. Tanda positif pada nilai koefesien regresi menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 62,1%, sedangkan sisanya sebesar 37,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian diantaranya sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, good corporate governance, dan lainnya.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 23,5%. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.900/122/BAKD Tahun 2008 menyebutkan tujuan utama program sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah dapat mempermudah pemerintah untuk mengelola keuangan di daerahnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang andal dan relevan. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas laproan keuangan pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keungan daerah. Semakin tinggi penerapan sistem informasi pengelolaan keungan daerah akan berdampak pada peningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Chabib & Heru, 2014).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Mimba (2014), Yusup (2016), dan Lestari & Hastuti (2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 38,6%. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian

/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf, 2015:198). Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip good governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap. Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari & Syofyan, 2016).

Pengelolaan aset tetap daerah sangat penting dilakukan dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam menilai dan mengavaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui pengelolaan aset daerah secara tertib, maka informasi nilai aset daerah yang akan disajikan dalam akan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta akan menghasilkan laporan aset di neraca dengan informasi yang akurat. Semakin tinggi pengelolaan aset daerah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Poe dkk, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sundari (2018), Poe dkk (2017), Anshari & Syofyan (2016), Rami (2014), Lestari (2016), dan Caesarima (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 62,1%. Terdapat dua indikator yang menjadi penilaian BPK untuk meraih WTP diantaranya soal pengelolaan keuangan dan soal aset (Anggiono, 2019). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salahsatu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020). Selain sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pengelolaan aset tetap daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir, ternilai,

tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mengacu pada prinsip good governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap daerah. Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari & Syofyan, 2016). Pengelolaan aset tetap daerah sangat penting dilakukan dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam menilai dan mengavaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui pengelolaan aset daerah secara tertib, maka informasi nilai aset daerah yang akan disajikan dalam akan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta akan menghasilkan laporan aset di neraca dengan informasi yang akurat. Semakin tinggi pengelolaan aset daerah, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Poae et al., 2017).

5. SIMPULAN

Hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun dari hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya beberapa hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan terkait dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset tetap daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yaitu meningkatkan kegiatan maintenance secara berkala untuk mengurangi kerusakan sistem dan meningkatkan kinerja sistem, adanya pelatihan nag dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai

dalam menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penginputan data dan meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang disajikan, serta meningkatkan pemanfaatan laporan keuangan yang dihasilkan sistem sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah kedepannya. Terkait dengan pengelolaan aset daerah yaitu meningkatkan inventarisasi fisik, ketetapan yuridis, dan pengalihan aset tetap milik daerah secara menyeluruh dan akurat, melakukan perhitungan penilaian dan penyusutan aset tetap secara akurat dan transparan, meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tetap daerah untuk menambah pendapatan daerah, serta melakukan pengawasan dan pengecekan aset tetap daerah antara catatan dan bukti fisik secara periodik. Terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kegiatan evaluasi kinerja kedepannya berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya, meningkatkan ketepatan waktu penyajian dan kelengkapan informasi laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi, meminimalisir adanya kesalahan pada laporan keuangan yang bersifat material, serta menyajikan dan mengkalsifikasikan pos akuntansi secara konsisten dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, dan meningkatkan penggunaan bahasa dalam laporan keuangan agar mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.

REFERENSI

- Anggiono, R. (2019). *Pengelolaan Keuangan Terus Dibenahi di Setiap SKPD*. Dikutip dari artikel : <https://jabarekspres.com/berita/2019/03/22/pengelolaan-keuangan-terus-dibenahi-di-setiap-skpd/>.
- Anshari, & Syofyan, E. (2016). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*. 4(1), 1-18.
- Caesarima, E. D. (2017). *Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Chabib, S., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Dewi, P. A. R., & Mimba, N. P. S. H. (2014). Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) pada kualitas laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 442-457.
- Elsye, D. R. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Gimnastiar, S. (2021). *Bandung Barat Mulai Benahi Aset*. Dikutip dari artikel : <https://www.bandungbaratpos.com/bandung-barat-mulai-benahi-aset/>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Edisi Revisi*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Lestari, M. (2016). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Lestari, S. F., & Hastuti, H. (2020, September). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 820-827).
- Malta, Y. A., & Rusdianti, I. S. (2023). Analysis of SAKTI Implementation on the Quality of Management of Fixed Assets in the Religious High Court of Jayapura. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, Vol. 2(2), 55-62. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i2.42>

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Ni'am, S., & Santosa, B. (2022). *KPK Jebloskan Eks Bupati Bandung Barat Aa Umbara ke Lapas Sukamiskin*. Dikutip dari artikel : <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/19212331/kpk-jebloskan-eks-bupati-bandung-barat-aa-umbara-ke-lapas-sukamiskin>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(1), 159-169. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15356>
- Rambe, E. O. S., & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Pertama. Salemba Empat.
- Ramli, M. R. (2014). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh). *SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen) STIES*, 4(2), 84-103.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 11(1), 29-39.
- Rusdianti, I. S., Irmadariyani, R., & Kustono, A. S. (2022). E-Finance: Mitigation of Fraud Tendency in Indonesia. *IJEBD International Journal Of Entrepreneurship And Business Development*, 5(3), 581-589. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i3.1857>
- Sari, C. W. (2019). *Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Pemkab Bandung Barat Sulit Beroleh WTP*. Dikutip dari artikel : <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01308652/ribuan-aset-belum-bersertifikat-pemkab-bandung-barat-sulit-beroleh-wtp>.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP STIM YKPN.
- Sopannah, A., Hasan, K., Putra, S. K., & Rusdianti, I. S. (2023). *Akuntabilitas publik organisasi nirlaba*. Scopindo Media Pustaka.
- Sundari, R. (2018). Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpkn) Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114-124.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.900/122/BAKD Tahun 2008. Tentang Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yusuf, M. (2015). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat.
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 10(2), 149-160.